

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI  
WISATA BAHARI PULAU GILI NOKO KABUPATEN GRESIK  
(Studi Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik)**

**Achmad Afandi  
Sunarti  
Luchman Hakim**  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Malang  
Email: [afandbociel@gmail.com](mailto:afandbociel@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Gili Noko Island is one of the maritime destination in Gresik Regency which has potential in the form beauty of coral reefs and marine life that should be developed into a tourist destination. But based on current conditions this potential is not yet supported by the accessibility and adequate facilities so that the need for the role of local government in particular (Disbudparpora) as one of the stakeholders who have authority in the development of tourist destinations in the region. This study used descriptive qualitative method with the purpose of (1) Determine the role of local governments (Disbudparpora) in developing tourist destinations Gili Noko. (2) Determine an inhibiting factor and the motivating factor in developing tourist destinations on the island of Gili Noko. Sources of data obtained from informants, observation, documents, and documentation. Analysis of data using four stages: data collection, data reduction.*

**Keywords:** *The Role of Local Government, Gili Noko Island, Tourism Destinations, Maritime Tourism, and Tourism attractions.*

**ABSTRAK**

Pulau Gili Noko merupakan salah satu destinasi wisata bahari di Kabupaten Gresik yang memiliki potensi berupa keindahan terumbu karang dan biota laut yang layak dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata. Akan tetapi berdasarkan kondisi saat ini potensi tersebut masih belum didukung dengan aksesibilitas dan juga fasilitas yang memadai sehingga perlu adanya peran pemerintah daerah khususnya Disbudparpora sebagai salah satu *stakeholder* yang memiliki wewenang dalam pengembangan destinasi wisata di daerahnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan (1) Mengetahui peran pemerintah daerah (Disbudparpora) dalam mengembangkan destinasi wisata Pulau Gili Noko. (2) Mengetahui faktor penghambat dan faktor pendorong dalam melakukan pengembangan destinasi wisata di Pulau Gili Noko. Sumber data diperoleh dari informan, observasi, dokumen, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**Kata Kunci:** *Peran Pemerintah Daerah, Pulau Gili Noko, Destinasi Wisata, Wisata Bahari dan Daya tarik wisata.*

## PENDAHULUAN

Pengembangan wisata dari sektor bahari dianggap sebagai salah satu langkah yang tepat dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Berkembangnya pariwisata bahari diharapkan dapat menambah devisa utama negara dari sektor pariwisata yang saat ini masih mengandalkan potensi alam dan budaya yang berada di daratan. Selain untuk aktivitas pertambangan dan pelabuhan, laut dan pantai juga dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi karena keindahan lautnya (Suwanto, 2004:17)

Terdapat tiga area wisata bahari yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata. Area tersebut meliputi area darat pantai yang merupakan tempat wisata yang digunakan untuk menikmati sinar matahari dan permainan pasir pantai, area laut yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan olahraga air, serta area dasar laut yang digunakan wisatawan untuk menikmati keindahan alam bawah laut. Sebagai negara yang memiliki potensi wisata bahari yang beragam tersebut, perlu dilakukan adanya pengembangan dalam meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas pendukung seperti pelabuhan laut serta pendukung lainnya untuk memudahkan wisatawan (Muljadi dan Warman, 2014:237).

Dinas Pariwisata sebagai pihak dari pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengembangkan potensi wisata di daerahnya harus mempunyai perencanaan dalam mengembangkan pariwisata serta kebijakan pariwisata yang mampu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat maupun wisatawan dalam melakukan pengembangan. Pengembangan tersebut dapat berupa peningkatan potensi daya tarik wisata maupun meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Menurut Damanik dan Weber (2006:11) elemen penawaran wisata yang harus ada di dalam pengembangan destinasi pariwisata sering disebut *triple A* yang terdiri dari atraksi, aksesibilitas, dan amenities.

Pulau Gili Noko merupakan salah satu pulau kecil yang berada di sekitar Pulau Bawean dan terdapat masyarakat di dalamnya. Pulau Gili Noko merupakan salah satu pulau yang memiliki pesona bawah laut yang cukup menarik. Wisatawan dapat menikmati keindahan bawah laut serta hamparan pasir pantai yang sangat indah. Sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi andalan wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Bawean (RIPKA, 2013), wisatawan yang berkunjung ke Pulau Gili Noko dapat menikmati *sunset* maupun *sunrise* terbaik di pulau tersebut, tidak hanya itu keindahan

bawah laut pada destinasi ini juga menjadi atraksi yang dapat menarik banyak wisatawan. Daya tarik yang ada di Pulau Gili Noko sangat berpotensi untuk dikembangkan. Berdasarkan kondisi saat ini keadaan fasilitas sarana dan prasarana serta kemudahan aksesibilitas di Pulau Gili Noko masih kurang memadai sehingga perlu adanya pengembangan pada beberapa aspek tersebut (Bawean.net).

Aksesibilitas serta fasilitas yang tersedia pada destinasi wisata di Pulau Gili Noko yang dinilai kurang memadai dan kurang mendukung tersebut perlu dilakukan perencanaan pengembangan karena daya tarik wisata yang ditawarkan di Pulau Gili Noko sudah cukup mampu untuk menarik wisatawan datang ke destinasi tersebut. Peran *stakeholder* dalam pengembangan destinasi ini sangat diperlukan karena sebuah pengembangan membutuhkan banyak pihak yang terlibat baik dari pihak pemerintah, swasta (*investor*), maupun masyarakat. Akan tetapi berdasarkan kondisi saat ini di Pulau Gili Noko masih belum ada *investor* yang menginvestasikan dananya untuk pengembangan Pulau Gili Noko menjadi salah satu penghambat dalam pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Hambatan juga ditambah dengan pasifnya masyarakat dalam pengembangan Pulau Gili Noko.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Wisata Bahari

Istilah wisata bahari menurut Muljadi dan Warman (2014:219) diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam waktu sementara untuk menikmati atau menyalurkan hobi yang berhubungan dengan kelautan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wisata bahari adalah segala aktifitas perjalanan yang berhubungan dengan laut atau kelautan dan dilakukan sementara. Aktivitas yang dilakukan dapat berupa menikmati keindahan alam atau melakukan aktivitas *sport* seperti *diving*, *jet ski* atau selancar.

Objek wisata bahari yang baik sebagai destinasi wisata menurut Muljadi dan Warman (2014:220-221) khususnya untuk tempat untuk melakukan olahraga air seperti *diving* memiliki syarat sebagai berikut:

- a) Lingkungan laut yang sehat dan tidak kotor.
- b) Informasi tentang rute perjalanan.
- c) Terdapat variasi atraksi lokasi *diving*, misalnya bangkai kapal, terumbu karang, dan lain-lain.
- d) Keindahan pemandangan alam laut.

e) Banyak pesona bawah laut yang menarik.

## 2. Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata

Jenis-jenis daya tarik wisata menurut Prof Marioti dalam (Yoeti, 1996:172) diantaranya adalah:

- a. Daya tarik alam yang meliputi:
  - 1) Iklim,
  - 2) Bentuk tanah dan pemandangan
  - 3) Fauna dan Flora
  - 4) Pusat-pusat kesehatan
- b. Hasil ciptaan manusia atau daya tarik wisata buatan, seperti Benda-benda bersejarah, kebudayaan dan keagamaan, serta Tata cara hidup masyarakat (*The way life*)

## 3. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata

Pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* di dalam pengelolaan bidang pariwisata. Pemerintah juga memiliki fungsi sebagai pembuat berbagai kebijakan tentang pariwisata pada suatu daerah serta berperan dalam meningkatkan devisa dan pendapatan asli daerah melalui bidang pariwisata. Pemerintah daerah dalam hal ini Disbudparpora yang menaungi bidang kepariwisataan diharapkan memiliki peran dalam menyediakan pariwisata di daerahnya dengan cara mengembangkan daya tarik serta saran kepariwisataan lainnya. Hal tersebut akan mampu terwujud jika pemerintah selaku pemegang kepentingan mampu mengembangkan pariwisata secara optimal.

Menurut Subadra (2006) pemerintah memiliki beberapa peran dalam bidang pariwisata yaitu:

1. Perencanaan Pariwisata
2. Pembangunan Pariwisata
3. Kebijakan pariwisata
4. Peraturan Pariwisata

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti akan mendeskripsikan peran Disbudparpora dalam melakukan proses pengembangan destinasi wisata bahari Pulau Gili Noko pada aspek perencanaan pariwisata, pembangunan pariwisata, implementasi kebijakan pariwisata, serta peraturan-peraturan pariwisata yang saat ini ada pada destinasi tersebut.

## Fokus Penelitian

1. Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Gresik dalam melakukan pengembangan destinasi wisata bahari Pulau Gili Noko yang meliputi perencanaan pariwisata, pembangunan pariwisata, kebijakan pariwisata dan peraturan pariwisata.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pengembangan destinasi Pulau Gili Noko.

## Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Kabupaten Gresik dengan situ penelitian di dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), serta Pulau Gili Noko

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun instrument penelitian yang digunakan ialah: peneliti, pedoman wawancara, alat perekam, kamera dan alat tulis menulis.

## Sumber Data

1. Data Primer diperoleh melalui metode wawancara dengan sumber datanya adalah Staf Promosi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik, Staf UPT Pariwisata Bawean, Kepala Desa Pulau Gili, Ketua POKMASWAS serta Pemilik Kapal Wisata.
2. Data Sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang terkait dengan pengembangan Pulau Gili Noko, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik.

## Analisis dan Keabsahan Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (2013:11) dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa aktivitas dalam menganalisis data berupa *data collection* (pengumpulan data), *data condensation* (kondensasi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan). dan ke absahan data menggunakan teknik triangulasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Pulau Gili Noko

Pulau Gili Noko merupakan salah satu gugusan pulau yang terletak di Pulau Bawean yang secara administratif masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Gresik. Secara geografis kepulauan Bawean terletak antara 112 45' Bujur Timur dan 5 45' Lintang Selatan. Luas wilayah sebesar 196,27 Km<sup>2</sup>. kepulauan Bawean terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Batas-batas Pulau Bawean sebelah barat, timur, utara, dan selatan adalah Laut Jawa. Pulau Bawean terbentuk dari sisa-sisa gunung berapi yang tua dengan ketinggian maksimal 655m. Pulau Bawean terbagi menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tambak (13 desa) dan Kecamatan Sangkapura (17 desa). Pulau Bawean mempunyai beberapa pulau kecil yang mengelilinginya, antara lain Pulau Menuri, Pulau Noko, Pulau Selayar, Pulau Beci, Pulau Gili, Pulau Karangbila dan Pulau Tanjung Nusa.

Pulau Gili adalah salah satu pulau yang paling luas dan berpenghuni di sekitar Pulau Bawean. Sedikitnya ada 700 kepala keluarga dengan berbagai etnis yang menghuni pulau yang berjarak sekitar 2,3 km dari timur pulau Bawean ini. Pulau Gili termasuk dalam wilayah Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura dengan jarak 10 KM dari Pelabuhan Sangkapura. Pulau ini merupakan bagian dari Pulau Bawean yang luasnya kurang lebih 50.000 m<sup>2</sup> dan berpenduduk sekitar 800 jiwa. Untuk menuju pulau ini dapat menggunakan perahu dari Desa Sidogedungbatu. Kawasan pantai pulau ini memiliki hamparan pasir pantai dengan warna putih dengan air laut yang sangat jernih. Sedang di laut sekitar Pulau Gili Noko banyak terdapat terumbu karang dengan ikan hias warna-warni. Sebagai latar belakang pengembangan destinasi wisata,

### Peran Pemerintah Daerah (Disbudparpora) dalam Pengembangan Destinasi Wisata Bahari Pulau Gili Noko

#### 1. Perencanaan Pariwisata

- peningkatan daya tarik wisata
- penyediaan fasilitas rumah makan
- meningkatkan aksesibilitas berupa alat transportasi
- perencanaan dalam meningkatkan promosi untuk menarik wisatawan.

#### 2. Pembangunan Pariwisata

Disbudparpora sudah berupaya untuk mengembangkan Pulau Gili Noko melalui pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Pembangunan tersebut dinilai

sudah cukup baik karena selain dapat digunakan wisatawan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar destinasi wisata. untuk melakukan aktivitasnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Sesuai dengan kondisi saat ini Disbudparpora perlu melakukan perencanaan pembangunan yang tepat untuk pariwisata bahari.

#### 3. Kebijakan Pariwisata

Disbudparpora dalam pengimplementasian kebijakan Pariwisata salah satunya yaitu melalui pembangunan infrastruktur yang ada di destinasi wisata Pulau Gili Noko. Infrastruktur tersebut berupa pengadaan jembatan penyebrangan menuju destinasi wisata Pulau Gili Noko. Jembatan tersebut selain dapat digunakan untuk kemudahan akses wisatawan dalam mengunjungi Pulau Gili Noko, juga dapat dimanfaatkan masyarakat yang ada di sekitar destinasi untuk kemudahan akses antar pulau yang menggambarkan karakteristik destinasi Pulau Gili Noko sendiri yang merupakan kepulauan dengan daya tarik utama yaitu wisata bahari.

#### 4. Peraturan Pariwisata

Disbudparpora tidak memiliki peraturan tertulis terkait destinasi wisata tersebut. Disbudparpora dalam mengatur kegiatan wisata tersebut masih sebatas himbauan secara lisan yang dilakukan untuk mengatur wisatawan yang berkunjung melalui penyedia jasa perjalanan pariwisata *Tour and Travel*. Masih belum adanya peraturan tertulis dari Disbudparpora dalam mengatur kegiatan pariwisata di destinasi wisata Pulau Gili Noko dikarenakan Disbudparpora memberikan wewenang kepada masyarakat serta perangkat desa dalam membuat sendiri peraturan-peraturan yang nantinya akan ditelurkan kedalam peraturan desa.

### Faktor-Faktor Pendorong Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Gili Noko

- Daya tarik alam yang indah berupa terumbu karang
- Dukungan dari masyarakat untuk mengembangkan destinasi wisata bahari Pulau Gili Noko

### Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Gili Noko

- masih belum adanya investor yang menanamkan modalnya untuk mengembangkan destinasi wisata Pulau Gili Noko sehingga sarana dan prasarana yang

tersedia masih belum dapat melayani wisatawan secara maksimal.

2. transportasi yang tersedia masih kurang meliputi transportasi umum maupun yang dikhususkan untuk pariwisata untuk memudahkan wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau Gili Noko.
3. pengembangan Pulau Gili Noko masih mengandalkan APBD dari pemerintah
4. minimnya pengetahuan mengenai manajemen dan minat masyarakat yang mau berpartisipasi dalam pengelolaan destinasi wisata Pulau Gili Noko

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pemerintah daerah melalui Disbudparpora berperan dalam melakukan perencanaan dalam meningkatkan daya tarik wisata serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Perencanaan tersebut meliputi penambahan daya tarik wisata berupa pengadaan *water sport* berupa *banana boat* dan pelestarian terumbu karang. Penyediaan sarana dan sarana seperti rumah makan serta peningkatan aksesibilitas untuk wisatawan juga sudah direncanakan oleh Disbudparpora untuk mengembangkan Pulau Gili Noko. Pengenalan Pulau Gili Noko ke masyarakat luas juga direncanakan oleh Disbudparpora dengan cara menambah kegiatan promosi yang dilakukan dengan mengikuti *event-event* pariwisata dan melakukan promosi melalui media elektronik.
2. Pemerintah daerah melalui Disbudparpora sudah berperan dalam melakukan pembangunan pada destinasi wisata Pulau Gili Noko. Pembangunan yang sudah dilakukan saat ini masih berupa pengadaan jembatan serta dermaga apung yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas wisatawan dan masyarakat. Pembangunan berupa gazebo serta surau juga sudah dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan wisatawan.
3. Pemerintah daerah melalui Disbudparpora memiliki peran dalam pengimplementasian kebijakan pengembangan Pulau Gili Noko yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan serta ekonomi masyarakat. Kebijakan pengembangan wisata di Pulau Bawean khususnya di Pulau Gili Noko diharapkan mampu memberikan kontribusi

yang baik dalam terbukanya mata pencaharian baru bagi masyarakat Pulau Gili yang saat ini sebagian besar masih bermata pencaharian sebagai nelayan seperti masyarakat pesisir pada umumnya. Kebijakan tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat contohnya saja masyarakat yang memiliki mata pencaharian baru sebagai jasa angkut berupa kapal wisata.

4. Pemerintah daerah melalui Disbudparpora memberikan wewenang kepada perangkat desa untuk membuat peraturan dalam mengatur kegiatan pariwisata di Pulau Gili Noko dalam bentuk peraturan desa. Pemberian wewenang tersebut didasari karena Disbudparpora menganggap bahwa masyarakat yang lebih tahu akan kondisi yang ada di Pulau Bawean khususnya Pulau Gili Noko sehingga Disbudparpora tidak ingin membatasi masyarakat di Pulau Gili Noko dalam melakukan pengembangan dengan membuat peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Disbudparpora. Berdasarkan kondisi saat ini peraturan pariwisata yang sudah ada adalah mengenai penetapan tarif kapal dan juga peraturan untuk wisatawan yang diwajibkan untuk menggunakan alat keselamatan ketika menaiki kapal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran Disbudparpora dalam melakukan pembuatan peraturan-peraturan pariwisata di Pulau Gili Noko dengan cara memberikan kewenangan langsung ke masyarakat.

### Saran

#### 1. Dinas Pariwisata

- a. Mengoptimalkan pembangunan sesuai dengan perencanaan serta kebijakan yang menjadi dasar sebuah pengembangan pariwisata di Pulau Gili Noko.
- b. Memaksimalkan kinerja Disbudparpora Kabupaten Gresik dengan membuat peraturan terkait pengembangan destinasi wisata Pulau Gili Noko sehingga pelaksanaan pariwisata dapat berjalan dengan baik.
- c. Meningkatkan *skill* dan kualitas masyarakat lokal mengenai pariwisata terutama dalam keorganisasian serta manajemen pengelolaan Pulau Gili Noko, serta menjadikan masyarakat sebagai salah satu atraksi wisata dengan adanya kegiatan sehari-hari masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan.

- d. Melakukan pelatihan serta sosialisasi tentang kepariwisataan untuk membuka wawasan masyarakat tentang manfaat adanya wisata serta bagaimana cara untuk membuka usaha wisata.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan di Pulau Gili Noko sehingga program yang diciptakan oleh Disbudparpora berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat.
- f. Promosi yang dilakukan dalam memperkenalkan keindahan Pulau Gili Noko kepada wisatawan harus diimbangi dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana sehingga wisatawan memiliki kepuasan serta kenyamanan dalam mengunjungi destinasi wisata Pulau Gili Noko.
- g. Disbudparpora harus memiliki kebijakan atau peraturan yang dapat menarik *investor* untuk ikut dalam pengembangan Pulau Gili Noko sehingga sarana dan prasarana dapat terpenuhi.
- h. Melakukan penkajian terhadap pembangunan yang sesuai dengan karakteristik destinasi wisata Pulau Gili Noko.
- i. Mengemas daya tarik wisata yang ada dan membuat kalender kegiatan wisata yang bisa digunakan sebagai informasi untuk wisatawan dalam melakukan kunjungan di Pulau Gili Noko

## 2. Masyarakat Pulau Gili Noko

- a. Ikut berperan aktif terhadap jalannya aktifitas pengembangan destinasi wisata Pulau Gili Noko.
- b. Mengoptimalkan kinerja organisasi dengan ikut berpartisipasi di dalamnya.
- c. Selalu berkoordinasi dengan pemerintah terkait arah pengembangan destinasi wisata Pulau Gili Noko.
- d. Menjadikan kearifan lokal masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan untuk menjadi daya tarik wisata.
- e. Ikut menjaga lingkungan destinasi wisata Pulau Gili Noko yang masih alami.
- f. Mengikuti pelatihan untuk keorganisasian pariwisata atau pembuatan usaha pariwisata baik barang maupun jasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- bawean.net/2013/07/mengemas-pulau-gili-noko-menuju-wisata.html diakses pada 9 Maret 2016
- Damanik, Janianton dan Weber, Helmut. 2006. *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: PUSPAR UGM dan Andi.
- Miles, B. Mattew dan Hubberman, A. Michael., Saldana, Johnny. 2013. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook: Edition 3*. United States of America: SAGE Publications.
- Muljadi dan Andri Warman. 2014. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata (RIPKA) Kabupaten Gresik 2013
- Subadra, I Nengah. 2006. *Ekowisata Hutan Mangrove dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus di Mangrove Information Center, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar*. S2 Kajian Pariwisata. Bali: Universitas Udayana.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Yoeti, Oka A. 1992. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Edisi Revisi. Bandung : Angkasa
- 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita.
- 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.